

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks ekonomi di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat ketidakserapan angkatan kerja dalam dunia kerja menjadi berkurang (Rosnidah, Fatimah, & Hadiyati, 2022). Keterbatasan lapangan pekerjaan memicu masyarakat untuk berinovasi dan membangun usaha sendiri, yaitu dengan mendirikan UMKM yang merupakan salah satu usaha dengan cukup relatif mudah dan cepat berkembang (Lesmana, 2021). Pertumbuhan usaha mikro menjadi sumber penting bagi peluang lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Keberadaan UMKM perlu didukung agar dapat bertahan, memperluas kesempatan berusaha, dan kesempatan kerja (Hariyono, 2021).

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat tergantung pada aktivitas bisnis, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memiliki peran penting yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, Selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Definta, Adinugraha, Gunawan, & Anisatus, 2024). UMKM juga berperan dalam pendistribusi hasil pembangunan dan tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah, sehingga pertumbuhannya mengalami kenaikan karena UMKM ini dapat bertahan dari terpaan krisis global (Adriansyah, Sumarlan,

Zs, & Pertiwi, 2023), terutama pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 silam dan pada masa pandemi COVID-19, hanya sektor UMKM yang mampu tetap berdiri dan bertahan dengan kokoh, Data Badan Pusat Statistik mencatat kondisi tersebut pasca krisis ekonomi (Haryani, 2022). Dengan itu UMKM perlu didorong untuk mampu meningkatkan keuntungan yang lebih besar, dengan cara melakukan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Purba, 2019).

UMKM berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi negara karena mendukung perekonomian nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia (Sonia, 2023). UMKM adalah kategori usaha yang beroperasi di berbagai sektor diantaranya, usaha perdagangan, pertanian, industri, jasa, dan sebagainya (Risal & Wulandari, 2021),(Erik Setiawan, 2021).

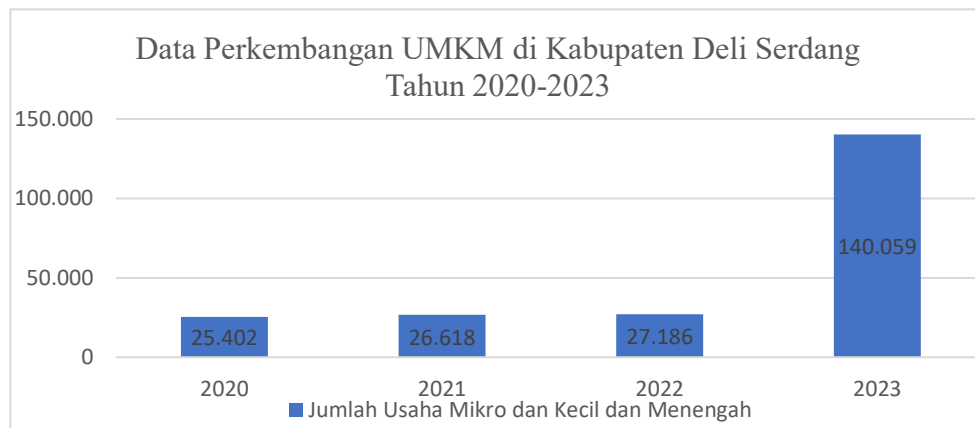
Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam perekonomian global, sehingga pada setiap tanggal 27 Juni diperingati sebagai Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peringatan tersebut secara resmi dideklarasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada April 2017. Penetapan hari UMKM ini memberikan bukti bahwa UMKM begitu sangat membantu dalam mendukung perekonomian global. Tujuan dari hari peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kontribusi signifikan UMKM dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mendukung pengembangan sektor di seluruh dunia (Laheba & Bacilius, 2022).

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melaporkan bahwa hingga Juli 2024, sebanyak 25,5 juta UMKM telah beralih ke ekosistem digital.

Hingga tahun 2023, KemenKopUKM mengumpulkan data mengenai 13,4 juta pelaku koperasi dan UMKM. Pada tahun yang sama, KemenKopUKM dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan untuk membangun basis data tunggal UMKM di Indonesia. UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, menyumbang 61% dari PDB dan menyerap sebanyak 117 juta pekerja, yang merupakan 97% dari total tenaga kerja (BPS, 2023).

Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Indonesia kini menjadi negara terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat, dan India. Dalam hal ini Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menjadi negara maju pada tahun 2030. Menurut Teten Masduki, terkait ini pemerintah berupaya meningkatkan daya saing dengan memprioritaskan infrastruktur untuk konektivitas dan juga sebagai bentuk inovasi. Jika pertumbuhan ekonomi negara dapat dipertahankan antara 4,5% hingga 5,3%. Maka, ada kemungkinan besar Indonesia akan sukses memimpin G20 atau bahkan bisa menjadi Presidensi ASEAN (Amartha, 2024).

Selain itu, merujuk pada data yang disampaikan oleh BPS Kabupaten Deli Serdang, diketahui pada tahun 2023, UMKM di Kabupaten Deli Serdang mengalami perkembangan yang cukup signifikan (Goodstats data, 2023), Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1

Sumber: Data perkembangan UMKM di kabupaten Deli Serdang yang diolah pada Tahun 2020-2023

Selain itu, berdasarkan informasi yang disampaikan di atas, diketahui juga jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Deli Serdang mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2020 sebanyak 25.402 unit usaha dan pada tahun 2023 sebanyak 140.059 unit usaha.

Perkembangan Umkm sangat berpengaruh terhadap bagaimana pengelolaan usahanya. Suatu usaha juga memerlukan pembuatan suatu laporan keuangan yang sangat penting karena untuk menilai apakah usaha tersebut mengalami pertumbuhan atau tidak. Berdasarkan survei awal peneliti yang dilakukan bahwa banyak Umkm di kabupaten deli serdang yang salah satunya desa Nogo rejo tepatnya pada UMKM Tempe belum menerepakan laporan keuangan dengan baik. padahal laporan keuangan terkhusus umkm, yang dikenal dengan SAK EMKM. SAK EMKM dibuat untuk menyajikan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan suatu entitas, yang berguna bagi berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Desa Nogo Rejo merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, khususnya di sektor

industri kecil. UMKM di Masyarakat yang lebih di kenal dengan sebutan home industri atau usaha rumahan, salah satu sektor UMKM yang cukup signifikan adalah industri makanan, di mana tempe sebagai produk fermentasi kedelai tidak hanya menjadi makanan pokok bagi masyarakat, kaya akan nilai gizi dan juga memiliki potensi pasar yang luas.

Banyak UMKM termasuk produsen tempe, menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan laporan keuangan yang belum di terapkan secara Sistem Akuntansi Keuangan Menengah (SAK EMKM), Dalam penerapan sehari-hari UMKM tempe ini membuat laporan usahanya dengan sederhana, hanya mencatat perhitungan pengeluaran dan pemasukan. Sistem pencatatan sederhana yang digunakan berupa catatan harian Sehingga mereka bingung mengetahui berapa pendapatan bersih mereka setiap bulan (Ela, Munayang, & Zuhroh, 2023). Banyak pelaku UMKM yang belum memisahkan keuangan milik pribadi dan perusahaan. Oleh karena itu, untuk memastikan keuangan bisnis dan keuangan pribadi terpisah adalah langkah penting bagi pengusaha untuk menjamin kelangsungan bisnis mereka. (Widyaningrum & Purwanto, 2022). Sehingga ketika ditanya mengenai sejumlah aset yang dimiliki, mereka dapat mengungkapkannya (Nopangga, Surono, K, Sari, & Aziz, 2021).

Setiap pemilik bisnis tentu tidak lepas dari pencatatan transaksi keuangan (Korompis, Tuerah, Tangon, & Malonda, 2021). Manajemen keuangan berperan sebagai pengelola keuangan dimana UMKM dapat melakukan penyusunan rencana pemasukan dan pengeluaran dana dalam periode tertentu (Arifwangsa Adiningrat, Nurnajamuddin, & Wahyuni, 2022). Manajemen keuangan yang efektif dapat

dicapai melalui penerapan sistem pengelolaan akuntansi yang baik (Novianti & Epi, 2023). Penyusunan laporan keuangan suatu entitas dimaksudkan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. laporan keuangan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan Keputusan untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 201 tentang Penyajian Laporan keuangan yang disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 yang merupakan perubahan dari penomoran PSAK 1.

Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang belum memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang akuntansi. Umumnya, laporan keuangan UMKM hanya mencatat jumlah barang diterima dan dikeluarkan, transaksi pembelian barang dan penjualan, piutang dan hutang, tanpa mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku, Akibatnya, informasi keuangan yang dihasilkan belum mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya (Azizah Rachmanti, Hariyadi, & Andrianto, 2019). Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan UMKM, IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2018. SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi sederhana dan mudah diterapkan oleh UMKM, sehingga mereka dapat menyusun laporan keuangan yang mendukung akuntabel dan mendukung pengambilan keputusan. Dengan demikian, SAK

EMKM diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia dan mempermudah akses pembiayaan dari perbankan (Feriyanto & Utami, 2022).

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan bagi entitas merupakan salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengetahui keberlangsungan usaha dalam jangka panjang serta penyusunan SAK EMKM dilatar belakangi dengan adanya UMKM dalam menerapkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) (Usunier, J-C., & Lee, 2019). SAK EMKM merupakan standar yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP, karena ditujukan untuk transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM (Adolph, 2016). Laporan keuangan ialah data yang mendeskripsikan keadaan keuangan entitas yang bisa dijadikan gambaran kapasitas atau kinerja keuangan entitas (Simanjuntak, Sumual, & Bacilius, 2021).

Analisis laporan penerapan standar akuntansi ini memberikan gambaran mengenai bagaimana kinerja tata kelola yang baik di masa lampau dan di masa yang akan datang (Perdana, Khusnia, & Fitriana, 2024). Dengan adanya SAK EMKM yang menekankan prinsip kesederhanaan, diharapkan UMKM akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan, yang terstruktur dan akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan tersebut (Kamal, 2022).

Namun, meskipun pentingnya laporan ini faktanya masih banyak pelaku UMKM, termasuk usaha tempe yang kesulitan dalam menerapkan SAK EMKM. Kondisi ini menimbulkan potensi risiko terkait dengan kurangnya pemahaman dalam proses operasional secara menyeluruh dan proses pencatatan biaya tidak

dilakukan sebagaimana mestinya (Sari, 2023). Usaha Mikro Kecil Menengah membutuhkan strategi pengelolaan keuangan, dimana strategi tersebut dibuat dengan tujuan agar UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan produktivitas usahanya (Karimah, 2022). Setiap perusahaan dalam mengelola bisnis ataupun usaha tentu tidak lepas dari pencatatan transaksi keuangan (Korompis et al., 2021). Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tentunya penting bagi usaha Tempe untuk memastikan laporan keuangan mereka disusun dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu cara untuk mengukur kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah dengan menganalisis pengelolaan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) (Wildaniyati, Rohman, & Suharni, 2024). Peneliti berupaya untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dan efektivitas laporan keuangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapannya, penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi UMKM Tempe dalam menyusun laporan keuangan dan meningkatkan praktik akuntansi di sektor UMKM sesuai standart SAK EMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul” **Analisis Penerapan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM TEMPE di Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasikan masalah mengenai penerapan laporan keuangan yang belum disusun secara benar karena keterbatasan pemilik UMKM dalam pemahaman tentang laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM tempe.
2. Apa saja kendala yang dihadapi UMKM tempe dalam menerapkan SAK EMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM tempe.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang menghambat pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM pada UMKM tempe.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Peneliti sebagai berikut:

1. Bagi UMKM

Hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan tentang pentingnya akuntansi yang baik bagi pelaku UMKM mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan usahanya.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi Peneliti untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha. Ini mencakup aspek-aspek seperti perilaku pelaku usaha, pengelolaan modal, dan strategi pemasaran yang efektif.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Peneliti lain dalam bidang yang serupa, serta memberikan landasan teori dan data empiris untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga akan Menambah ilmu pengetahuan mengenai akuntansi pada UMKM.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 *Grand Theory*

Theory Entity (Teori Entitas) yang dikemukakan oleh Paton (1962) menyatakan bahwa sebuah organisasi, dipandang sebagai suatu kesatuan atau badan usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri dan memiliki status yang terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menginvestasikan dana atau modal dalam organisasi atau kesatuan ekonomi yang menjadi pandangan akuntansi.

Dari sudut pandang Paton, penting untuk memahami bahwa transaksi yang dicatat adalah yang melibatkan entitas itu sendiri, dan bukan kepentingan pribadi pemilik. Hal ini menegaskan adanya pemisahan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan individu pemilik. Dengan demikian, Laporan keuangan berfungsi sebagai medium pertanggungjawaban perusahaan atas aktivitas ekonominya, bukan sebagai representasi langsung dari hak atau kekayaan pemilik (Fathin Amalia Lestari, Elin Erlina Sasanti, & Adhitya Bayu Suryantara, 2022).

Penelitian ini berkaitan dengan penerapan akuntansi pada UMKM. Penerapan SAK dalam UMKM dimaksud untuk memastikan bahwa setiap unit usaha dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai

dengan standar yang telah diterapkan. Dalam kajian ini maka dalam konsep entitas merupakan pemisahan antara keuangan pemilik dan keuangan perusahaan. Ini berarti, bahwa kekayaan yang dimiliki oleh individu pemilik perusahaan secara akuntansi dipisahkan dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, peran akuntansi menjadi sangat penting dalam mendukung kelangsungan usaha.

2.1.2 Definisi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

UMKM adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik karena mereka belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (Kalsum, Ikhtiari, & Dwiyantri, 2021). Pembangunan ekonomi di Indonesia sangat berkaitan erat dengan perkembangan UMKM (Fitria, Hidayah, Suryani, & Prihandoyo, 2023). Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan.

Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang tercantum di UMKM-id.com. menyebutkan bahwa UMKM sebagai usaha skala kecil yang produktif mampu mempekerjakan 107,6 juta lebih masyarakat Indonesia. Kemampuan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja berkontribusi pada pendapatan domestik bruto sebesar

60,6%. Selain itu, keberadaan UMKM juga akan memutar roda perekonomian pada suatu daerah. Karena bahan baku produksi bisa langsung diperoleh dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, Masyarakat dapat mendapatkan apa yang dibutuhkan baik jasa maupun produk dengan lebih dekat karena banyaknya UMKM yang ada di sekitarnya.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar, khususnya SAK EMKM, bertujuan untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia agar meningkatkan pengetahuan, kepercayaan serta keterampilan pemilik usaha dalam mengelola laporan keuangan dengan baik. Hal ini diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dari lembaga perbankan (Ekasari, Handayanto, & Sulistyowat, 2021).

SAK EMKM menjelaskan konsep bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya, Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha tersebut, serta membedakan antara suatu entitas dengan entitas lainnya (Muhardi (2019), 2023).

Berdasarkan peraturan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008), Pasal 1.

Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.1.3 Kriteria Dan Karakteristik UMKM

1. Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Pasal 1, Mendefinisikan usaha Mikro sebagai Usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh individu atau badan perorangan yang memenuhi kriteria tertentu, dengan nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro memiliki asset maksimal Rp.50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan hasil penjualan tidak lebih dari Rp.300 juta.
- b. Usaha Kecil adalah usaha dengan nilai aset antara Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, serta hasil penjualan per tahun lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, dan.
- c. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500 juta hingga Rp.10 milyar, dengan hasil penjualan pertahun melebihi Rp. 2,5 milyar hingga maksimum Rp. 50 milyar (Al Farisi, Iqbal Fasa, & Suharto, 2022).

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dan

Menengah (PP UMKM) diterbitkan pemerintahan bersama dengan 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021. Kriteria UMKM yang baru diatur dalam Pasal 35 -36 PP UMKM berdasarkan modal usaha awal dan keuntungan penjualan tahunan yang digunakan untuk memulai atau mendaftarkan kegiatan usaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Najeeb Muizz & Majdi Zaabit, 2023).

Berikut ini adalah beberapa kriteria modal tersebut:

- 1) Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokkan dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan maksimum Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 1.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks 1 Miliar	Maks 2 Miliar
2	Usaha Kecil	>1 Miliar -5 Miliar	>2 Miliar -15 Miliar
3	Usaha Menengah	>5 Miliar -10 Miliar	>15Miliar-50Miliar

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Selain modal usaha, UMKM juga diharuskan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, seperti entitas bisnis lainnya. Jumlah karyawan juga dapat menjadi salah satu perbedaan antara UMKM dan UKM. Umumnya, usaha mikro memiliki jumlah karyawan 1–5 orang, usaha kecil 5–19 orang, dan usaha menengah 20–99 orang. Usaha besar dengan jumlah lebih dari 100 orang (Imawan, Mas'adah, Safitri, & Fadhil, 2023).

Tabel 1.2
Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	1-5 Orang	5-19 Orang	20-99 Orang	>100 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Usaha kecil adalah usaha produktif, yang dijalankan secara mandiri, yang dilakukan secara individu atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan (Nurazizah & Zulkarnain, 2022).

Pelaporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan laporan keuangan suatu entitas (Irawan & Nilwan, 2024).

2. Karakteristik UMKM

Karakteristik standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah adalah sebagai berikut:

- (1) SAK EMKM bersifat mandiri dan berdiri sendiri (Tidak Mengacu Kepada SAK Umum)
- (2) Mayoritas menggunakan konsep biaya historis, dengan pencatatan dan pelaporannya berdasarkan biaya perolehan awal.
- (3) Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh Entitas Mikro Kecil, dan Menengah, Sehingga relevan dan mudah diterapkan.
- (4) Penyusunan laporan keuangan lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum (Septiana & Khairudin, 2022).

Karakteristik dari usaha mikro, kecil dan menengah bersifat faktual dengan kegiatan usaha serta perilaku pengusaha itu sendiri (Al Farisi et al., 2022).

2.1.4 Peran UMKM dalam Ekonomi

Masalah utama bagi suatu negara adalah menciptakan kondisi masyarakat secara ideal dan mencari cara untuk merealisasikannya (Farisi, Fasa, & Suharto, 2022). Di era modern saat ini, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penopang atau tulang punggung bagi perekonomian negara. Kabupaten Deli Serdang, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak terkecuali dari dampak positif yang dihasilkan oleh UMKM. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Deli Serdang menjadi landasan bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja, pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Qadisyah, Hasanah, Hanum, & Harahap, 2023).

Dalam konteks ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berfungsi memegang peran vital sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja melalui keragaman produk dan jasa yang dihasilkan. Pertumbuhan sektor UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan pemberdayaan lokal.

Terdapat 3 peran UMKM bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, antara lain:

1. Mendorong Pemerataan Ekonomi

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting, terutama dalam sarana untuk meratakan tingkat perekonomian di kalangan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang berada digolongkan masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya UMKM tersebut, masyarakat yang berada di pelosok tidak perlu lagi harus ke kota untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Hal ini berkontribusi pada perputaran perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, karena Masyarakat pedalaman pun menjadi lebih produktif dalam mengembangkan usaha mereka.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UMKM berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi. Selain itu, keberadaan UMKM juga secara langsung turut membantu pemerintah dalam mencegah munculnya urbanisasi secara besar-besaran. karekan masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di daerah mereka.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat kecil yang disebabkan tingginya angka penyerapan tenaga kerja berkat keberadaan UMKM yang berada di berbagai

wilayah Indonesia. Hal ini akan mengurangi biaya distribusi dan biaya penyimpanan yang memiliki dampak cukup besar bagi Masyarakat dengan memperoleh harga yang lebih terjangkau. Jadi, UMKM secara tidak langsung berperan besar terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan Devisa Negara

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia berkontribusi dalam peningkatan devisa negara. Sebab, jangkauan pasar UMKM ini tidak hanya menjangkau pasar nasional tetapi juga mencakup hingga ke luar negeri. Tidak sedikit UMKM asal Indonesia berhasil bersaing di pasar Internasional sehingga mampu mengekspor produk yang dimiliki ke berbagai negara dengan menyesuaikan proses operasionalnya mulai dari produksi hingga promosi, dengan cara membangun jaringan dan peluang pasar melalui berbagai marketplace yang tersedia di pemasaran digital (Siregar, 2021).

2.1.4 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan elemen yang sangat penting bagi pemilik usaha sebagai dasar untuk mengembangkan usaha mereka dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya sebagian besar usaha, khususnya UMKM yang belum melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Hal tersebut disebabkan karena pemilik perusahaan berasumsi bahwa

perusahaan mereka belum terlalu besar kegiatan operasinya (Mandey, Saerang, & Pusung, 2018).

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan yang lengkap meliputi Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara) (Setyowati et al., 2023) selain itu, Laporan keuangan juga merupakan dasar akuntansi yang merangkul transaksi keuangan yang terjadi selama periode keuangan tertentu (Imtihan, Mayasari, & Aryzegovina, 2023).

Penerapan akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menunjukkan bahwa UMKM lebih memfokuskan diri pada pencatatan dan penyusunan laporan terkait penjualan, pembelian, persediaan, kas masuk dan kas keluar, serta biaya operasional dan biaya gaji (Komala L, 2024). Berdasarkan standar akuntansi keuangan bahwa penyusunan laporan keuangan dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena dapat memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi yang benar, tepat dan dapat diandalkan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja keuangan perusahaan. Ini akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kredibilitas laporan

keuangan tersebut (Hafid, Afiffudin, & Maqsudi, 2023). Menurut (*PSAK Umum 201*, n.d.) tentang Penyajian Laporan keuangan yang disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 yang merupakan perubahan dari penomoran PSAK 1 yaitu mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

- a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c) laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d) laporan arus kas selama periode;
- e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
 1. informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan
 2. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu

kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.1.5 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan serta menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang berguna bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak dapat meminta laporan keuangan tertentu guna untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (Entities & District, 2023).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2018) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan posisi keuangan, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan laporan keuangan. PSAK No. 1 dapat diterapkan untuk semua laporan keuangan tujuan umum yang disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang mudah dipahami.

Dalam penyusunan laporan keuangan, umumnya terdapat beberapa yang mencakup laporan keuangan seperti Laporan Posisi Keuangan,

Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan menurut SAK EMKM, laporan keuangan UMKM terdiri dari Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode, Laporan Laba Rugi selama periode dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Fachruddin, Arnita, & Sari, 2024).

2.1.6 Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) AI (2018) menjelaskan bahwa SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan dapat diterapkan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, SAK EMKM mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar. Oleh karena itu dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dari hasil usaha entitas tersebut (Beno, Silen, & Yanti, 2022). SAK EMKM ini dirancang sebagai standar akuntansi sederhana dan dapat digunakan untuk entitas mikro kecil dan menengah, sehingga UMKM dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang

umum dilakukan oleh UMKM dan dasar pengukuran berdasarkan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya pada biaya perolehan (Hamongsina, Sumual, & Tala, 2022). Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan langkah penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membantu UMKM dalam mengambil keputusan yang lebih baik, memahami kinerja keuangan mereka dan meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan. Adanya SAK EMKM dengan prinsip kesederhanaan diharapkan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menyajikan laporan keuangan untuk membangun kualitas UMKM. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sudah sepatutnya dilakukan, mengingat laporan keuangan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan dari suatu badan usaha (Uno, Kalangi, & Pusung, 2019).

Laporan posisi keuangan juga dikenal dengan neraca, berisi informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset ialah harta yang dimiliki perusahaan atau entitas usaha berdasarkan kegiatan yang telah

dilakukan didapat dari dunia usaha pada masa mendatang diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Kewajiban ialah hutang entitas dari kejadian yang sudah berlalu, penyelesaiannya menyebabkan keluarnya kas dari sumber daya entitas akan mendukung dari dunia usaha. Ekuitas ialah hak residu atas nilai suatu aset yang dikurangi dengan liabilitas (Aritonang, Harmain, & Nurwani, 2023).

Laporan Keuangan SAK EMKM terdiri dari

1. laporan posisi keuangan akhir periode,

Informasi posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas karena peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, terhadap arus kas kepada entitas.
- b. Liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki entitas akibat peristiwa masa lalu, Dimana penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas memiliki kewajiban saat ini

untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Penyelesaian kewajiban ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan asset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.

- c. Ekuitas adalah klaim hak residual(sisa) atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

2. laporan laba rugi selama periode

Laporan Laba Rugi merupakan kinerja keuangan entitas untuk periode tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi mencakup akun-akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi pada periode perubahan.

3. catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan menjelaskan untuk mengatur prinsip-prinsip yang mendasari informasi yang disajikan, berupa penjelasan

deskriptif atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi serta informasi tambahan lainnya. Catatan atas laporan keuangan meliputi:

- a. Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM;
- b. ikhtisar kebijakan akuntansi;
- c. informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material, sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM dapat dinilai dari persiapan yang sudah ada, salah satunya adalah adanya tenaga pembukuan khusus (Saputra, Anggraini, & Sayadi, 2022). Dengan adanya SAK EMKM, UMKM diharuskan membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK universal berbasis IFRS dan SAK ETAP. Dalam beberapa hal SAK EMKM memberikan banyak kemudahan bagi UMKM karena SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP (Akuntansi & Sari, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha Peneliti untuk mencapai kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk Penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dalam melakukan Penelitian, sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam kajian ini. Berikut beberapa Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penulisan ini, yang dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

N0.	Peneliti terdahulu	Nama penulis	Teknik pengumpulan data	Hasil Penelitian
1	Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Dwi Laundry.	Amrizal Imawan, Ninik Mas'adah, Maya Safitri, Faiz Abdillah Fadhil.	reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa usaha Dwi Laundry telah menerapkan akuntansi, namun pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masih bersifat manual dan sangat sederhana. selan itu, penerapan akuntansi belum mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam SAK EMKM.
2	Analisis Penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Sri Lasmi1, Sari Rusmita, Syarbini Ikhsan.	Observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peneliti telah menerapkan SAK-EMKM sebagai dasar dalam menyusun dan

	Teh Poci Siantan.			menyajikan Laporan keuangan Teh Poci Siantan, yang sudah mengikuti SAK EMKM. Peneliti juga menyusun Laporan neraca dan CALK.
3	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kedai Lalie Djiwo Di Kota Pasuruan.	Mochammad Hafid Rusli Afiffudin, dan Achmad Maqsudi.	Menggunakan wawancara dan observasi serta menarik Kesimpulan.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam pemahaman mengenai laporan keuangan, meskipun responden memiliki pengetahuan yang terbatas tentang tujuan dan manfaat laporan keuangan.
4	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Berdasarkan Kaidah SAK-EMKM bagi Kelompok Budidaya Ikan Lele Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang.	Imtihan Imtihan, Lisa Mayasari, Reffi Aryzegovina.	Sosialisasi, pendampingan dan evaluasi.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok budidaya ikan lele gunung sarik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai dalam pengelolaan keuangan berupa penyusunan atau pengelolaan arus kas dan penyusunan laporan keuangan untuk satu periode (periode Agustus 2023).
5	Penerapan SAK EMKM Pada Umkm Peternakan Ayam Boiler.	Pio Septiana1, Khairudin.	analisis data yang berbentuk kata, kalimat dan gambar.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa usaha Peternakan Ayam Broiler Belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM).

6	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo).	Moudy Olyvia Uno, Lintje Kalangi, Rudy J. Pusung.	Analisis data dan membuat Kesimpulan.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan di Rumah Karawo masih sangat sederhana, hanya mencakup pencatatan penjualan produk. Selain itu, Rumah Karawo belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku karena kurangnya pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM seharusnya dilakukan, mengingat laporan keuangan adalah indikator penting dalam menilai kinerja keuangan suatu badan usaha.
7	Studi Kualitatif Tentang Manfaat Dan Kerugian Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Ud Mitra Pelita.	Maurenthia J. Mandey, David P. E. Saerang, Rudy J. Pusung.	deskriptif dengan desain studi kasus.	UD Mitra Pelita belum menyusun laporan keuangan. Beberapa faktor yang membuat UD Mitra Pelita belum menyusun laporan keuangan antara lain tidak ada sumber daya manusia yang memadai, rendahnya tingkat kompetensi dalam bidang keuangan pemilik UD Mitra Pelita, serta pemilik usaha enggan untuk memberikan pengorbanan waktu dan biaya dalam menyusun laporan keuangan.

8	Implementasi Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Kota Sukabumi.	Nurazizah.	Sumber primer dan sumber sekunder.	Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa UMKM Mochi Sukabumi telah menerapkan beberapa standar akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangannya, seperti penjurnalan dan penyusunan arus kas. Namun, mereka belum sepenuhnya mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya. Hanya Laporan Laba Rugi yang sudah sesuai dengan SAK EMKM, sementara Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan belum disusun secara lengkap.
9	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Binaan Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Parepare.	Sri Rezky Handayani, Arfianty, Yadi Arodhiskara.	Mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai Penyusunan Laporan Keuangan (UMKM) berdasarkan (SAK EMKM).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) UMKM Kelompok Kedai Pesisir tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik karena baik karyawan maupun pemilik usaha tidak memahami pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; 2) Karyawan yang dipekerjakan adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan sebelumnya dan tidak paham tentang pencatatan; serta kurangnya pengetahuan pemilik UMKM Kelompok Kedai Pesisir mengenai standar

				akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan; 3) Kegiatan UMKM masih terfokus pada aktivitas lain serta produksi dan penjualan, sehingga waktu untuk menyusun laporan keuangan sangat terbatas.
10	Analisis Penerapan SAK EMKM pada Usaha Toko Pakaian di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala	ELa, Olivia H. Munayang, Siti Zuhroh	Teknik pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha toko pakaian belum sesuai dengan konsep dasar akuntansi. Usaha toko pakaian di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala belum menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Menengah (SAK EMKM), seperti tidak memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi. Sistem pencatatan yang digunakan masih sangat sederhana, berupa catatan harian.
11	The Effect of Socialization of SAK EMKM, Accounting Understanding, and Level of Readiness of MSME Business Actors towards the Application of SAK EMKM	Yogi Darma Saputra), Leriza Desitama Anggraini), Muhammad Hamdan Sayadi	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Penelitian ini diharapkan dapat membantu UKM dalam menyusun laporan keuangan.

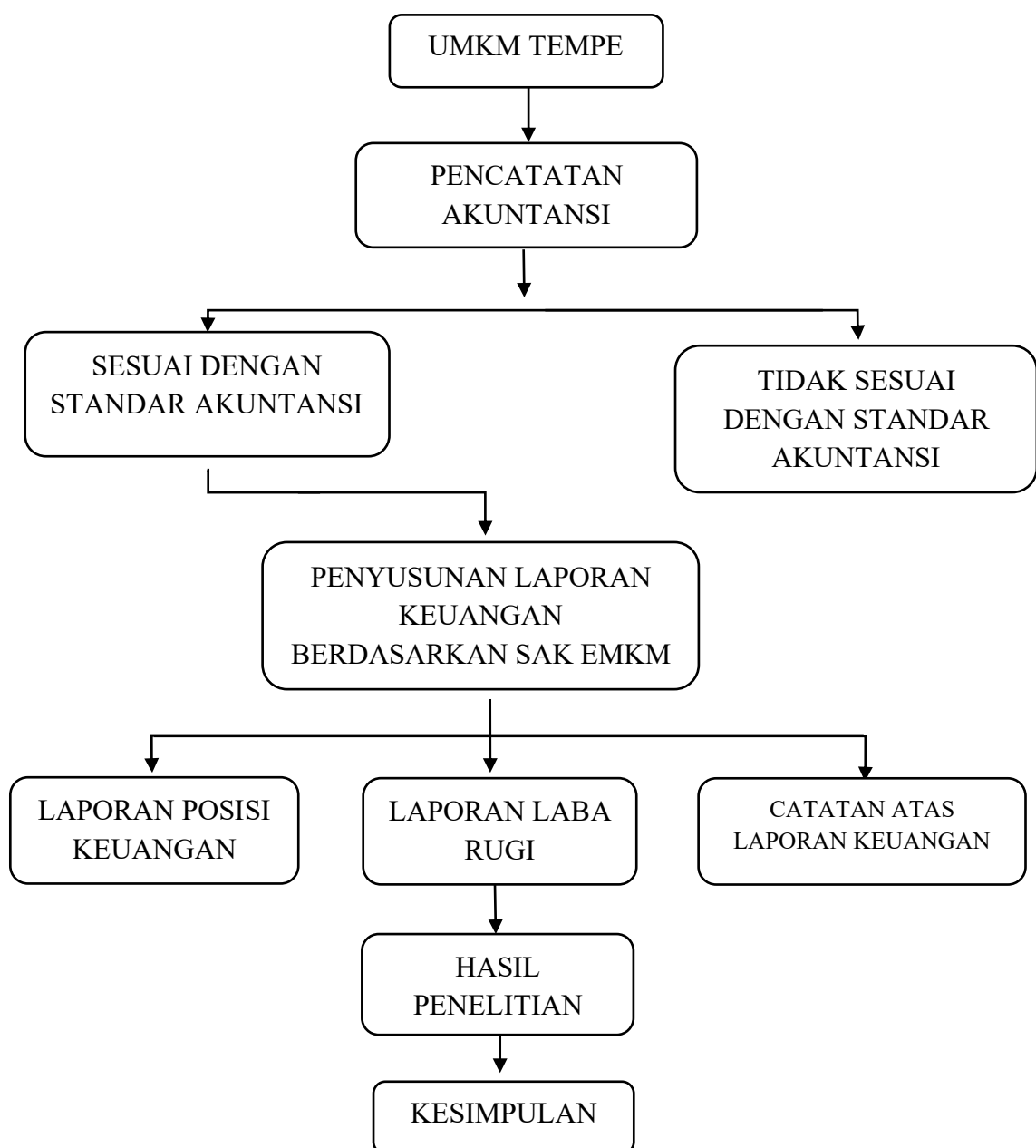
	in the Preparation of MSME Financial Reports (Case Study of MSMEs in Palembang City)			
12	Analysis Of The Implementation Of EMKM Financial Accounting Standards In The Preparation Of Financial Reports On Msmes, Micro, Small And Medium Entities (Case Study Of Strawberry Delight In Cirebon City)	Kokoh Nopangga, Surono, Endah Nurhawaeny K, Fitriya Sari, Taufik Aziz	penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi	Strawberry Delight juga belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM. Ketidaktahuan manajemen mengenai SAK-EMKM menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan entitas yang mereka kelola.
13	Application of SAK EMKM Accounting in Preparing Reports Finance in MSMEs Ceplis Melinjo Pesawaran Lampung	Sasmita Irawan and Afrizal Nilwan	bidang penelitian informasi strategi, wawancara, dokumentasi	Proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan UMKM Ceplis Melinjo masih sangat sederhana karena UMKM tersebut baru saja berdiri.
14	Analysis Of Financial	Indah Hari Utari	Pengumpulan data melalui wawancara,	Warung Nasi Pecel Madiun Dika Bolo

	Statements Of Msmes At The Implementation Of Financial Accounting Standards Of Small And Medium Entity (SAK EMKM)		dokumentasi dan observasi langsung.	mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangannya, antara lain kurangnya tenaga kerja dan pembukuan untuk membuat laporan keuangan. Mereka hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran untuk mencari laba karena kurangnya pengetahuan terkait cara membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.
15	Implementation of Financial Accounting Standards for Small and Medium Entities in Berastagi SMES, Karo District	Yunita Eriyanti Pakpahan, Wina Theresia br Naibaho.	penelitian dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara.	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM belum memahami apa saja yang diperlukan dipertanggungjawabkan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi atau pelatihan terkait akuntansi dan SAK EMKM. Selain itu, pelaku usaha juga mengalami kendala dalam hal waktu untuk menyusun laporan keuangan, anggapan bahwa laporan keuangan sulit dipahami, serta rendahnya kesadaran untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan SAK EMKM.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian sebelumnya terletak pada hal fokus yang meneliti tentang penerapan serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Sedangkan perbedaan Penelitian ini terletak pada standar pedoman yang digunakan, objek Penelitian serta tahun penelitian.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir